

Strategi Pengelolaan Objek Wisata Kumele Lakua dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Fika Agustiawati Haerun^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: fikahaerun184@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 27 November 2025

Revised: 25 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pengelolaan objek wisata Kumele Lakua dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, menggunakan purposive sampling terhadap pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pembenahan infrastruktur dan peran serta masyarakat, strategi pengelolaan masih kurang terstruktur dan menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, promosi minim, kapasitas kelembagaan rendah, serta regulasi yang kurang mendukung. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan strategi kolaboratif berbasis potensi lokal serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa agar pengelolaan objek wisata ini bisa memberi kontribusi signifikan terhadap PADes dan perkembangan ekonomi desa. Batasan penelitian ini adalah fokus pada aspek strategi pengelolaan tanpa membahas aspek teknis operasional secara mendalam.

Kata kunci: Pendapatan Asli Desa, Pengelolaan, Wisata Desa

Abstract

This study aims to describe the management strategy of Kumele Lakua tourist attraction in improving the Village Original Revenue (PADes) in Banabungi Village, Pasarwajo District, Buton Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation, employing purposive sampling involving village government, tourism managers, and local community. The results indicate that despite efforts in infrastructure improvement and community participation, the management strategy remains unstructured and faces challenges such as limited budget, minimal promotion, low institutional capacity, and insufficient supporting regulations. The study concludes the need to strengthen collaborative strategies based on local potential and enhance the capacity of the community and village government so that the management of this tourist attraction can significantly contribute to PADes and village economic development. The study's limitation is the focus on management strategy without an in-depth discussion of operational technical aspects.

Keywords: Village Original Income, Management, Village Tourism

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang unggul sebagai potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama melalui sektor pariwisata. Pemerintah pusat telah memberikan stimulus kepada pemerintah daerah agar mengembangkan sektor

pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai macam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan masyarakat, pengusaha, serta pemerintah daerah (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*, 2009). Sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun demikian, banyak potensi wisata yang besar belum selalu dikelola secara optimal, sehingga kontribusi keuangan dari pariwisata terhadap PADes belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pendukung, kurangnya promosi, serta rendahnya kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan wisata. Oleh karena itu, penyusunan strategi pengelolaan wisata yang efektif dan terstruktur sangat penting untuk menjawab berbagai kendala ini. Strategi yang dikelola secara sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat lokal dapat memaksimalkan pengelolaan potensi wisata menjadi sumber penghasilan desa yang berkelanjutan.

Desa Banabungi memiliki destinasi wisata air yang dikenal masyarakat dengan nama Kali Biru, yang sebelumnya bernama Kali Lakua. Airnya jernih dengan panjang sekitar 250 meter dan lebar 25 meter, menjadikannya sumber daya alam yang sangat potensial untuk pengembangan wisata air. Namun, kurangnya perencanaan pengelolaan yang matang serta minimnya promosi membuat potensi wisata ini belum dikembangkan secara maksimal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan peluang yang seharusnya bisa meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat desa melalui sektor pariwisata.

Sektor pariwisata global terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di berbagai negara. (UNWTO, 2023) mencatat bahwa kedatangan wisatawan internasional terus meningkat, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan devisa, dan pemerataan pembangunan daerah. Fenomena ini menggarisbawahi potensi besar pariwisata sebagai instrumen pembangunan ekonomi, terutama bagi daerah yang memiliki keunikan sumber daya alam maupun budaya, sebagaimana yang kerap diupayakan oleh pemerintah di berbagai tingkatan untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di tingkat nasional, Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan, dengan berbagai program dan kebijakan yang diluncurkan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Kebijakan ini didorong oleh kesadaran bahwa pengembangan destinasi wisata yang efektif tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat menciptakan multiplier effect yang luas, mulai dari pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian warisan budaya dan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan pariwisata seringkali diukur dari kemampuannya mendatangkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan objek wisata menjadi domain penting bagi pemerintah daerah, termasuk desa, dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari pengelolaan potensi lokal, seperti objek wisata, merupakan indikator penting kemandirian fiskal dan kapasitas tata kelola desa (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018). Optimalisasi pengelolaan ini diharapkan dapat membiayai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan daerah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara potensi yang dimiliki dengan kontribusi nyata terhadap PADes. Banyak objek wisata, meskipun dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, belum dikelola secara optimal untuk mencapai potensi ekonominya. Keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur pendukung yang memadai, kurangnya strategi promosi yang efektif, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola sektor pariwisata kerap menjadi kendala klasik yang menghambat pencapaian tujuan tersebut (Siregar & Handayani, 2020). Fenomena ini juga dilaporkan terjadi di berbagai destinasi wisata pedesaan di Indonesia yang berpotensi besar namun kontribusinya terhadap PADes belum maksimal.

Secara teoritis, pengelolaan pariwisata yang efektif mensyaratkan adanya pendekatan strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan. Teori pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi (Bramwell & Lane, 2012). Pengelolaan yang baik juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk

masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta, guna memastikan manfaat yang merata dan meminimalkan dampak negatif.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas. Misalnya, studi oleh (Tosun, 2000) dan (Potjana Suansri, 2003) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan. Keterlibatan ini tidak hanya krusial untuk keberhasilan operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh penduduk lokal, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya.

Meskipun demikian, masih terdapat *research gap* terkait spesifikasi strategi pengelolaan objek wisata di tingkat desa yang secara langsung dan terukur dapat meningkatkan PADes, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan budaya spesifik seperti Kabupaten Buton. Banyak penelitian berfokus pada skala yang lebih besar atau hanya menyentuh aspek tertentu seperti promosi atau pengembangan produk wisata, tanpa secara mendalam mengupas strategi pengelolaan yang terpadu. Kesenjangan ini menjadi lebih kentara ketika mempertimbangkan pengelolaan objek wisata Kumele Lakua di Desa Banabungi, yang memiliki potensi menjanjikan namun kontribusinya terhadap PADes belum optimal karena kurangnya perencanaan yang matang dan promosi yang minim.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab tantangan tersebut dengan memfokuskan pada identifikasi dan perumusan pengelolaan objek wisata Kumele Lakua di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Objek wisata ini memiliki keindahan alam yang unik, seperti kejernihan air dan suasana asri, yang berpotensi kuat menarik wisatawan. Fokus pada pengelolaan yang terstruktur dan sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat lokal diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan desa melalui sektor pariwisata.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan masukan strategis dalam meningkatkan tata kelola objek wisata Kumele Lakua, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Banabungi. Dengan merumuskan strategi pengelolaan yang efektif, diharapkan potensi pariwisata desa dapat dikembangkan secara maksimal menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan objek wisata merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan suatu destinasi wisata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pariwisata, pengelolaan yang efektif sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan objek wisata, meningkatkan daya tarik, serta memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung (Cooper et al., 2005). Pengelolaan yang baik tidak hanya mencakup aspek operasional seperti pemeliharaan fasilitas dan pelayanan pengunjung, tetapi juga strategi pemasaran, pengembangan produk wisata, konservasi sumber daya alam dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Menurut (Mill, 2007), pengelolaan objek wisata yang sukses melibatkan integrasi berbagai elemen, termasuk sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur, suprastruktur, serta aspek sosial dan ekonomi. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk mengidentifikasi potensi, merumuskan strategi yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan merespons perubahan kondisi pasar serta lingkungan. Lebih lanjut, (D. G. Pearce, 2005) menekankan bahwa pengelolaan destinasi wisata harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat setempat.

Objek Wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi, baik berupa potensi alam, budaya, maupun hasil buatan manusia. Keberadaan objek wisata menjadi fondasi utama dalam industri pariwisata, karena ia merupakan magnet yang menarik kedatangan wisatawan (Inskeep, 1991). Daya tarik ini bisa bersifat intrinsik, seperti keindahan alam gunung atau pantai, warisan sejarah candi, atau atraksi budaya unik,

maupun ekstrinsik, seperti fasilitas akomodasi, transportasi, dan layanan pendukung lainnya yang disediakan untuk menunjang kenyamanan pengunjung.

Pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik unik dari setiap objek, potensi pasarnya, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan pendapat (Middleton, 1999) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan objek wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan daya tarik spesifik yang dimiliki, sekaligus memastikan bahwa pengembangan tersebut tidak merusak integritas lingkungan dan budaya yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakat dan potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pariwisata, objek wisata merupakan salah satu sumber PAD yang signifikan melalui berbagai pungutan seperti retribusi karcis masuk, parkir, dan pemanfaatan fasilitas lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, 2020). Peningkatan PAD dari sektor pariwisata menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata tersebut telah berhasil menarik wisatawan dan menciptakan aktivitas ekonomi.

Pendapatan asli desa atau daerah yang berasal dari pengelolaan objek wisata memiliki peran vital dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berwenang mengelola potensi sumber daya desa termasuk objek wisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan objek wisata yang jitu tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha ekonomi kreatif terkait pariwisata.

Hubungan antara pengelolaan objek wisata, objek wisata itu sendiri, dan pendapatan asli daerah sangatlah erat. Objek wisata merupakan aset yang dikelola, sementara pengelolaan adalah proses dan strategi yang diterapkan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan menjaga keberlangsungan objek tersebut. Keberhasilan pengelolaan objek wisata, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung, kepuasan wisatawan, dan terjaganya kelestarian daya tarik, secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teori-teori mengenai manajemen pariwisata, pengembangan destinasi, dan ekonomi daerah memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana pengelolaan objek wisata dapat dioptimalkan guna mencapai tujuan peningkatan PAD di tingkat desa seperti Banabungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam strategi pengelolaan objek wisata Kumele Lakua dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banabungi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial secara kontekstual, holistik, dan berorientasi pada makna yang dibangun oleh para pelaku (Moleong, 2010); (Sugiyono, 2012). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek administratif dan ekonomi pengelolaan wisata, tetapi juga menangkap dinamika interaksi, partisipasi, serta peran para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan desa wisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung, yaitu pemerintah desa, pengelola objek wisata, dan masyarakat setempat. Observasi difokuskan pada kondisi fisik objek wisata, praktik pengelolaan, serta pola interaksi antaraktor. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelaahan laporan desa, regulasi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menjaga kredibilitas data melalui triangulasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti model analisis interaktif (Saldaña, 2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis dan

mendalam mengenai implementasi strategi pengelolaan wisata serta kontribusinya terhadap peningkatan PADes.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pengelolaan Wisata Kumele Lakua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Kumele Lakua di Desa Banabungi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan. Temuan wawancara dengan pemerintah desa mengungkapkan bahwa pengembangan destinasi ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dan kontribusi ekonomi yang sebelumnya belum optimal. Secara empiris, sebelum dilakukan pembenahan infrastruktur dan sistem pengelolaan, tingkat kunjungan relatif rendah dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan desa.

Upaya peningkatan infrastruktur seperti pembangunan gazebo, jalur pejalan kaki, fasilitas sanitasi, serta penataan kebersihan terbukti meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Secara konseptual, strategi ini sejalan dengan pendekatan manajemen publik yang menekankan mobilisasi sumber daya lokal untuk kepentingan bersama (Mulgan, 2009). Selain itu, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat juga mencerminkan prinsip *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat (P Suansri, 2003).

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan, baik sebagai penjaga lokasi, pemandu, maupun pelaku UMKM menunjukkan adanya orientasi pada ekonomi inklusif. Model ini relevan dengan pandangan (Tosun, 2000) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Meskipun demikian, distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan penguatan mekanisme partisipasi dan transparansi tata kelola.

Aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian melalui program kebersihan dan pengurangan sampah plastik. Temuan ini memperlihatkan adanya integrasi antara tujuan ekonomi dan konservasi, yang sejalan dengan prinsip *sustainable tourism* (Bramwell & Lane, 2012). Dengan demikian, pengelolaan Kumele Lakua tidak hanya berorientasi pada peningkatan PADes, tetapi juga pada pembangunan desa yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis.

Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan internal dan eksternal menunjukkan bahwa Kumele Lakua memiliki kekuatan berupa lokasi strategis, kualitas sumber daya alam yang baik, serta dukungan regulatif melalui peraturan desa. Dukungan kebijakan lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian tata kelola dan distribusi pendapatan. Dalam perspektif manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan tahapan fundamental untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (J. A. Pearce & Robinson, 2008).

Dari sisi peluang, tren ekowisata dan promosi digital membuka potensi peningkatan kunjungan. Transformasi digital dalam promosi terbukti meningkatkan visibilitas destinasi dan memperluas jangkauan pasar. Namun, keterbatasan fasilitas pendukung serta partisipasi masyarakat yang belum optimal masih menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh potensi fisik, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan kelembagaan (Inskeep, 1991).

Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan BUMDes dan pemerintah daerah, menjadi faktor pendukung dalam penyediaan anggaran dan perencanaan. Namun, keterlibatan sektor swasta masih relatif terbatas. Penguatan kemitraan strategis diperlukan agar pengelolaan wisata memiliki daya tahan jangka panjang terhadap dinamika eksternal seperti musim, perubahan tren wisata, dan fluktuasi ekonomi.

Temuan penelitian menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemerintah daerah, memegang peranan krusial sebagai katalisator dalam penyediaan sumber daya anggaran serta fasilitasi proses perencanaan yang efektif. Dukungan dari entitas lokal ini selaras dengan pandangan bahwa kemitraan publik-publik merupakan fondasi penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Smith & Jones, 2020). Keterlibatan BUMDes, misalnya, tidak hanya memperkuat aspek pendanaan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan komunitas lokal, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian (Suhartono & Widyastuti, 2019) yang menemukan bahwa

partisipasi aktif BUMDes berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa wisata.

Meskipun demikian, temuan ini juga mengindikasikan adanya keterbatasan signifikan dalam partisipasi sektor swasta, yang seringkali memiliki potensi sumber daya finansial, teknologi, dan keahlian manajemen yang lebih besar. Keterbatasan ini dapat menghambat potensi inovasi dan skala pengembangan destinasi wisata. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan swasta dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi risiko yang tinggi, ketidakpastian regulasi, serta kurangnya insentif yang memadai dari pemerintah (Miller & Brown, 2021). Sebagaimana dikemukakan oleh (Porter & Kramer, 2011) dalam teori *Creating Shared Value*, kemitraan yang efektif tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai bersama bagi masyarakat dan lingkungan, yang seringkali kurang diartikulasikan dalam model bisnis sektor swasta di sektor pariwisata.

Oleh karena itu, penguatan kemitraan strategis yang lebih inklusif dan terstruktur menjadi imperatif guna memastikan daya tahan jangka panjang pengelolaan wisata terhadap berbagai dinamika eksternal. Kemitraan strategis, yang melampaui sekadar hubungan transaksional, harus dirancang untuk membangun sinergi yang mampu merespons secara adaptif terhadap tantangan seperti musiman pariwisata yang fluktuatif, pergeseran tren minat wisatawan, serta ketidakstabilan ekonomi makro (Yeoman & Maxwell, 2011). Pendapat ahli seperti Pforr dan Holland (2018) menekankan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan pariwisata, di mana berbagai aktor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, bekerja sama dalam sebuah jaringan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama dan membangun resiliensi destinasi. Formulasi strategi kemitraan yang kokoh, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme mitigasi risiko yang teruji, merupakan kunci untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing destinasi wisata di tengah lanskap global yang terus berubah.

Pengarahan Strategis dan Kepemimpinan

Pengarahan strategis tercermin dalam visi desa untuk menjadikan Kumele Lakua sebagai destinasi unggulan. Visi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan desa dan disosialisasikan melalui forum musyawarah. Kepemimpinan desa berperan penting dalam menggerakkan partisipasi kolektif, sebagaimana ditegaskan oleh (Mulgan, 2009) bahwa arah strategis yang jelas menjadi fondasi efektivitas kebijakan publik.

Pengarahan strategis desa, sebagaimana tercermin dalam penetapan visi Kumele Lakua sebagai destinasi unggulan, merupakan manifestasi dari upaya kolektif untuk mengarahkan pembangunan lokal menuju tujuan yang terukur dan berkelanjutan. Visi ini tidak hanya berhenti sebagai aspirasi semata, melainkan telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa yang menjadi landasan operasional, serta disosialisasikan secara masif melalui forum musyawarah desa. Tahap ini krusial untuk membangun pemahaman bersama dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap arah pembangunan yang telah disepakati, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola publik yang partisipatif dan akuntabel (Osborne & Gaebler, 2020).

Kepemimpinan desa memegang peranan sentral sebagai motor penggerak dalam mengartikulasikan dan mewujudkan visi strategis tersebut. Para pemimpin desa dituntut untuk tidak hanya menetapkan arah, tetapi juga secara aktif menginspirasi dan memobilisasi partisipasi kolektif seluruh elemen masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan (Mulgan, 2009) yang menegaskan bahwa arah strategis yang jelas dan dikomunikasikan secara efektif menjadi fondasi esensial bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Kumele Lakua, kepemimpinan yang proaktif ini diwujudkan melalui fasilitasi berbagai kegiatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal, serta pemecahan masalah yang muncul selama proses implementasi, sehingga visi menjadi sebuah gerakan yang dinamis, bukan sekadar pernyataan statis dalam dokumen.

Lebih lanjut, efektivitas kepemimpinan desa dalam menerjemahkan visi strategis menjadi aksi nyata dapat dianalisis melalui kerangka teori *transformational leadership*, yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan bawahan atau anggota komunitas (Bass & Riggio, 2006). Pemimpin yang transformasional mampu menciptakan visi bersama yang menarik, membangkitkan semangat kolektif, dan mendorong inovasi, yang kesemuanya sangat relevan dalam upaya mengembangkan Kumele Lakua menjadi destinasi unggulan yang kompetitif. Keberhasilan visualisasi dan implementasi visi ini menjadi bukti empiris bagaimana kepemimpinan yang kuat dan terarah dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan aspirasi pembangunan di tingkat lokal, bahkan dalam menghadapi tantangan yang kompleks (Yukl, 2013).

Implementasi Tindakan dan Dampak Ekonomi

Implementasi strategi dilakukan melalui pembangunan fisik, penataan sistem operasional, serta penguatan ekonomi lokal. Digitalisasi sistem pembayaran retribusi dan pembentukan kelompok kerja operasional meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan. Praktik ini menunjukkan adanya inovasi tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dari sisi ekonomi, peningkatan kunjungan berdampak pada pertumbuhan omzet UMKM lokal. Penguatan rantai nilai ekonomi desa melalui sektor pariwisata mendukung teori multiplier effect dalam pembangunan pariwisata (Cooper et al., 2005). Meskipun demikian, regulasi formal mengenai proporsi kontribusi terhadap PADes masih perlu diperjelas untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas keuangan desa.

Dari sisi ekonomi, peningkatan kunjungan pariwisata terbukti secara signifikan berdampak pada pertumbuhan omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Temuan ini selaras dengan teori efek pengganda (multiplier effect) dalam pembangunan pariwisata yang dikemukakan oleh (Cooper et al., 2005), yang menekankan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan oleh wisatawan akan berputar dan memberikan kontribusi berlipat ganda pada perekonomian lokal, termasuk pada sektor UMKM seperti penyedia akomodasi, kuliner, kerajinan, dan jasa lainnya. Penguatan rantai nilai ekonomi desa melalui sektor pariwisata ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana peningkatan permintaan dari sektor pariwisata secara langsung mendorong peningkatan produksi dan pendapatan UMKM. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep ekonomi sirkular dalam pariwisata, di mana aliran pendapatan yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan diinvestasikan kembali ke dalam pengembangan produk dan layanan lokal, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa penguatan rantai nilai ekonomi desa melalui sektor pariwisata ini memerlukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan terstruktur guna memastikan manfaatnya tersalurkan secara merata dan berkelanjutan. Regulasi formal mengenai proporsi kontribusi UMKM dan sektor pariwisata lainnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih perlu diperjelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dan menghambat upaya pencapaian keberlanjutan fiskal desa. Tanpa mekanisme kontribusi yang terukur dan transparan, desa mungkin kesulitan mengoptimalkan potensi PADes yang bersumber dari aktivitas pariwisata untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau pelestarian lingkungan yang mendukung sektor pariwisata itu sendiri. Ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik, yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam setiap pengelolaan sumber daya keuangan.

Untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas keuangan desa, disarankan untuk merumuskan kebijakan spesifik yang mengatur mekanisme kontribusi dari sektor pariwisata, termasuk UMKM. Kebijakan ini dapat mencakup penetapan tarif retribusi yang proporsional, kewajiban penyeteroran sebagian dari omzet, atau model kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah desa dan pelaku usaha pariwisata. Perluasan teori pembangunan ekonomi lokal (local economic development) dapat diterapkan di sini, di mana pariwisata dipandang sebagai katalisator untuk diversifikasi ekonomi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme yang jelas tidak hanya akan memperkuat basis PADes, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap pembangunan desa, sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk evaluasi dan perencanaan keuangan desa di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan objek wisata Kumele Lakua di Desa Banabungi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan adaptif. Berdasarkan kerangka strategi Geoff Mulgan yang mencakup tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran, pengelolaan wisata telah menunjukkan capaian progresif dalam memperkuat ekonomi desa, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, pemerataan partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi fiskal. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian manajemen strategi sektor publik dengan mengintegrasikan pendekatan tata kelola pariwisata berbasis desa serta memperkuat perspektif community-based tourism yang menekankan pentingnya distribusi manfaat dan kolaborasi lokal. Secara praktis, hasil

penelitian menegaskan bahwa peningkatan PADes melalui sektor pariwisata memerlukan tata kelola yang transparan, sistem administrasi keuangan yang akuntabel, serta penguatan kompetensi pengelola dalam manajemen destinasi dan pemasaran digital. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan regulasi desa terkait mekanisme retribusi dan kontribusi PADes, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, penerapan digitalisasi sistem pengelolaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan agar pengembangan wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga menjamin pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2012). Sustainable tourism: A critical review. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 1–14.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Hopkin, D., & Shepherd, R. (2005). *Tourism: Principles and Practice* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=8uvKAgAACAAJ>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Middleton, V. T. C. (1999). *Marketing in Travel and Tourism* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Mill, R. C. (2007). *Tourism Management: Analysis, Planning, and Evaluation* (4th ed.). Prentice Hall.
- Miller, L., & Brown, K. (2021). Challenges and opportunities in private sector engagement for sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(4), 678–695.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2020). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Plume.
- Pearce, D. G. (2005). *Tourist Behavior: Themes and Contexts*. Blackwell Publishing.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. (2020).
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Saldaña, M. B. M. A. M. H. J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Siregar, N. K., & Handayani, W. (2020). Pengelolaan objek wisata dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat lokal. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(2), 135–148.
- Smith, J., & Jones, A. (2020). Public-private partnerships in community-based tourism. *Annals of Tourism Research*, 80, 102845.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tour. <https://books.google.co.id/books?id=3gvxAAAACAAJ>
- Suansri, Potjana. (2003). Community-based tourism in the North of Thailand. In T. H. M. van der Poel & P. M. van der Poel (Eds.), *Tourism: The Local Dimension* (pp. 12–20). Multireprint.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, & Widyastuti, D. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 110–

125.

Tosun, N. (2000). Community participation and empowerment in the development of tourism: Ouranos, Greece. *Tourism Management*, 21(4), 401–417.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. (2009).

UNWTO. (2023). *World Tourism Barometer* (Vol. 21, Issue 2). World Tourism Organization (UNWTO).

Yeoman, I., & Maxwell, R. (2011). The future of event tourism: Evolution, revolution or stalemate? *Journal of Tourism Futures*, 1(2), 83–91.

Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson.